Volume 10 Nomor 2 Ed. Desember 2024
p-ISSN: 2460-805X e-ISSN: 2550-0295; page: 616-628
DOI: 10.24252/iqtisaduna.v10i2.73660

Analisis Faktor Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pengentasan Kemiskinan Berbasis Ekonomi Islam di Kabupaten Bulukumba

Irwanuddin[1*], Sitti Aisyah[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. HM Yasin Limpo No.36, Romangpolong, Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia
E-mail: irwanuddin.abbas@uin-alauddin.ac.id

Diterima: 16 Mei 2024 Direvisi: 15 September 2024 Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak,

Dalam Islam, kemiskinan wajib diatasi melalui pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba, lalu menafsirkannya dalam kerangka maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data runtun waktu tahun 2010–2024 dari Badan Pusat Statistik yang dianalisis dengan regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, PDRB per kapita ADHB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, inflasi Sulawesi Selatan sebagai proksi berpengaruh positif dan signifikan, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan (Sig. 0,002; R^2 = 0,781). Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga paling mengancam pemeliharaan jiwa (hifzh an-nafs) dan harta (hifzh al-mal) masyarakat miskin. Penelitian ini mengusulkan sinergi pemerintah daerah dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif yang berlandaskan keadilan, musyawarah, pemberdayaan, dan amanah.

***Kata Kunci**: kemiskinan; maqashid syariah; pertumbuhan ekonomi; inflasi; pengangguran; manajemen zakat*

Abstract,

In Islam, poverty must be overcome through both economic growth and a fair distribution of wealth. This study analyzes the effect of economic growth, per capita income, inflation, and unemployment on the number of poor people in Bulukumba Regency and interprets the findings within the maqasid al-shariah framework. It uses a quantitative approach with 2010–2024 time series data from Statistics Indonesia (BPS), analyzed by multiple linear regression in IBM SPSS 26. The results show that economic growth has a positive but insignificant effect, GRDP per capita at current prices has a negative but insignificant effect, South Sulawesi inflation as a proxy has a positive and significant effect, and open unemployment has a positive but insignificant effect. Simultaneously, the four variables significantly affect poverty (Sig. 0.002; R^2 = 0.781). These findings show that rising prices pose the greatest threat to the protection of life (hifz al-nafs) and wealth (hifz al-mal) of the poor. The study proposes synergy between local government and the management of zakat, infaq, sadaqah, and productive waqf based on justice, consultation, empowerment, and trust.

***Keywords**: poverty; maqasid al-shariah; economic growth; inflation; unemployment; zakat management*

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.73660

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh kesempatan ekonomi yang memadai. Dalam perspektif ekonomi konvensional, kemiskinan berkaitan dengan rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, dan ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan. Sen (1999) memandang kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai, sedangkan Nurkse (1953) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan akibat rendahnya pendapatan, tabungan, investasi, dan produktivitas. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan material, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual dan tercapainya kesejahteraan (falah). Prinsip maqashid syariah menempatkan pemeliharaan jiwa (hifzh an-nafs) dan harta (hifzh al-mal) sebagai bagian penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2008). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan peningkatan aktivitas ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan penguatan instrumen sosial ekonomi Islam.

Secara teoretis, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai indikator makroekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Namun, hubungan tersebut tidak selalu berlangsung secara langsung karena manfaat pertumbuhan dapat terkonsentrasi pada kelompok ekonomi tertentu. Ravallion & Chen (2003) menekankan pentingnya *pro-poor growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat miskin. Demikian pula, peningkatan pendapatan per kapita belum tentu mencerminkan perbaikan kesejahteraan secara merata karena indikator tersebut tidak mencerminkan distribusi pendapatan. Sementara itu, inflasi berpotensi meningkatkan kemiskinan melalui penurunan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah (Easterly & Fischer, 2001), sedangkan pengangguran memperbesar risiko kemiskinan akibat hilangnya sumber penghasilan. Dalam konteks negara berkembang, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan menjadi semakin kompleks karena sebagian masyarakat tetap bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.xxxxx

daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba (2025), jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 35,60 ribu jiwa pada tahun 2010, meningkat menjadi 36,70 ribu jiwa pada tahun 2013, kemudian menurun menjadi 28,60 ribu jiwa pada tahun 2024. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dengan capaian 9,65 persen pada tahun 2012 dan melambat menjadi 0,43 persen pada tahun 2020. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp11,98 juta menjadi Rp44,48 juta, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,45 persen menjadi 2,23 persen. Di sisi lain, inflasi Sulawesi Selatan yang digunakan sebagai proksi inflasi daerah berubah dari 6,56 persen pada tahun 2010 menjadi 1,23 persen pada tahun 2024. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu berlangsung sejalan dengan perubahan indikator makroekonomi, sehingga diperlukan analisis empiris untuk memahami keterkaitan antar faktor ekonomi dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di Kabupaten Bulukumba.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara indikator makroekonomi dan kemiskinan menghasilkan temuan yang beragam. Hastin & Siswadhi (2021) mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, sedangkan Sembiring et al. (2021) serta Susanto & Pangesti (2021) menelaah keterkaitan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi Islam, Widiastuti & Kosasih (2021) memasukkan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Riyadi et al. (2025) juga mengkaji keterkaitan antara inflasi dan pengangguran dengan kemiskinan ekstrem dalam perspektif ekonomi Islam. Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi sekaligus memerlukan perhatian terhadap mekanisme distribusi kesejahteraan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengujian hubungan ekonomi di tingkat nasional atau provinsi, sedangkan kajian pada tingkat kabupaten yang mengintegrasikan analisis empiris dengan prinsip maqashid syariah dan implikasi manajemen pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi Islam masih relatif terbatas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup diukur hanya melalui peningkatan pendapatan agregat, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga batas kecukupan (*had al-kifayah*). Beik & Arsyianti (2015), melalui model CIBEST, menegaskan pentingnya dimensi material dan spiritual dalam mengukur kesejahteraan. Oleh karena itu, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) relevan untuk memperkuat distribusi sumber daya dan pemberdayaan ekonomi kelompok miskin. Pengelolaan ZISWAF yang produktif berpotensi mendukung peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi mustahik (Karunia &

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.73660

Amir, 2024; Mubarrak et al., 2023). Dalam konteks pembangunan daerah, efektivitas instrumen tersebut juga memerlukan koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan lembaga pengelola keuangan sosial Islam agar program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan antara analisis determinan ekonomi kemiskinan dan perumusan implikasi pengelolaannya dalam perspektif ekonomi Islam pada tingkat kabupaten. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi pengujian empiris faktor-faktor makroekonomi dengan interpretasi maqashid syariah sebagai dasar konseptual dalam merumuskan manajemen pengentasan kemiskinan berbasis ZISWAF. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba selama periode 2010–2024, menafsirkan keterkaitan tersebut berdasarkan prinsip maqashid syariah, serta merumuskan implikasinya bagi penguatan manajemen pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan analisis normatif dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan kuantitatif bertujuan mengestimasi arah dan besaran pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan analisis normatif digunakan untuk menginterpretasikan temuan empiris berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip *maqashid syariah*, serta merumuskan implikasinya terhadap manajemen pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk runtun waktu (*time series*) selama periode 2010–2024, dengan jumlah 15 observasi tahunan. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat keterbatasan ketersediaan data inflasi Kabupaten Bulukumba yang lengkap dan konsisten sepanjang periode pengamatan, tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebagai variabel proksi. Sementara itu, data tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 3,365 persen diperoleh melalui metode interpolasi linear berdasarkan nilai pengamatan tahun 2015 dan 2017. Definisi operasional variabel penelitian beserta keterkaitannya dengan prinsip *maqashid syariah* disajikan pada Tabel 1.

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.xxxxx

Tabel 1. Operasional Variabel dan Kaitannya dengan Maqashid Syariah

Variabel	Indikator dan Satuan	Unsur Maqashid Syariah
Jumlah penduduk miskin (Y)	Penduduk di bawah garis kemiskinan (ribu jiwa)	Belum terpenuhinya *had al-kifayah*
Pertumbuhan ekonomi (X_1)	Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba (%)	*Hifzh al-mal* (pemeliharaan harta)
PDRB per kapita ADHB (X_2)	Proksi pendapatan per kapita (juta rupiah)	*Hifzh al-mal* (pemeliharaan harta)
Inflasi Sulawesi Selatan (X_3)	Proksi inflasi Kabupaten Bulukumba (%)	*Hifzh an-nafs* dan *hifzh al-mal*
Tingkat pengangguran terbuka (X_4)	Angkatan kerja yang menganggur (%)	*Hifzh an-nafs* dan *hifzh al-mal*

Sumber: Disusun penulis berdasarkan data BPS, Chapra (2008), dan Beik dan Arsyianti (2016).

Data penelitian dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26. Metode ini digunakan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB), inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba. Secara matematis, model regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \varepsilon_t \quad \text{.....(1)}$$

Dalam persamaan tersebut, Y_t menunjukkan jumlah penduduk miskin, X_{1t} adalah pertumbuhan ekonomi, X_{2t} merupakan PDRB per kapita ADHB, X_{3t} adalah tingkat inflasi Sulawesi Selatan, dan X_{4t} menunjukkan tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya, β_0 merupakan konstanta, β_1 hingga β_4 adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, sedangkan ε_t merupakan komponen galat (*error term*) pada periode t.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H1: pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. H2: pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. H3: inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. H4: pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba.

Tahapan analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, kemudian dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas residual menggunakan Kolmogorov–Smirnov, uji multikolinearitas berdasarkan nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, serta uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin–Watson. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menilai signifikansi koefisien regresi secara parsial dan

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.73660

uji F untuk menguji signifikansi model secara simultan. Sementara itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin. Seluruh pengujian signifikansi dilakukan pada taraf 5 persen (α=5%) dengan mengacu pada Gujarati (2004).

Selanjutnya, hasil estimasi diinterpretasikan melalui pendekatan normatif ekonomi Islam dengan mengaitkan temuan empiris pada prinsip maqashid syariah, khususnya pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*). Interpretasi tersebut diperkuat melalui telaah terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran ekonomi Islam yang relevan. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar konseptual dalam merumuskan implikasi manajemen pengentasan kemiskinan berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Gambaran umum untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2 sebagai beriktu

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Dev.
Jumlah penduduk miskin	15	28,60	36,70	32,246	2,158
Pertumbuhan ekonomi	15	0,43	9,65	5,646	2,187
PDRB per kapita ADHB	15	11,98	44,48	27,829	10,468
Inflasi Sulawesi Selatan	15	1,23	8,61	4,043	2,023
Tingkat pengangguran terbuka	15	1,26	7,45	3,384	1,531

Sumber: Output IBM SPSS Statistics versi 26, data diolah, 2026.

Rata-rata jumlah penduduk miskin selama periode penelitian sebesar 32,25 ribu jiwa, dengan nilai terendah 28,60 ribu jiwa dan tertinggi 36,70 ribu jiwa. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen, PDRB per kapita ADHB sebesar Rp27,83 juta, inflasi Sulawesi Selatan sebesar 4,04 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,38 persen.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov–Smirnov sebesar 0,126 (> 0,05) sehingga residual berdistribusi normal. Seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, yaitu pertumbuhan ekonomi (0,451; 2,217), PDRB per kapita ADHB (0,197; 5,068), inflasi (0,605; 1,654), dan tingkat pengangguran terbuka (0,328; 3,046), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi 0,194; 0,419; 0,668; dan 0,388, seluruhnya di atas 0,05,

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.xxxxx

sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai Durbin–Watson sebesar 2,568 berada pada rentang 1 < DW < 3 sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian, model memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Hasil Estimasi Regresi dan Pengujian Hipotesis

Hasil estimasi regresi linear berganda persamaan penelitian dan pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 3 berikut ini

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien B	Std. Error	t	Sig.	Keterangan
Konstanta	28,044	4,091	6,854	0,000	–
Pertumbuhan ekonomi (X_1)	0,141	0,218	0,648	0,532	Positif, tidak signifikan
PDRB per kapita ADHB (X_2)	-0,023	0,069	-0,334	0,745	Negatif, tidak signifikan
Inflasi Sulawesi Selatan (X_3)	0,578	0,203	2,842	0,018	Positif, signifikan
Tingkat pengangguran terbuka (X_4)	0,505	0,364	1,387	0,195	Positif, tidak signifikan
$R = 0,883$; $R^2 = 0,781$; Adjusted $R^2 = 0,693$; $F = 8,890$; Sig. $F = 0,002$					

Sumber: Output IBM SPSS Statistics versi 26, data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 28,044 + 0,141X_1 - 0,023X_2 + 0,578X_3 + 0,505X_4 + e \quad \text{..... (2)}$$

Adapun nilai F sebesar 8,890 dengan signifikansi 0,002 (< 0,05) menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai R^2 sebesar 0,781 berarti 78,1 persen variasi jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita ADHB, inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka, sedangkan 21,9 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,693 menunjukkan kemampuan penjelasan model sebesar 69,3 persen setelah memperhitungkan jumlah variabel. Faktor di luar model tersebut dapat mencakup aspek nonmaterial, seperti kondisi sosial dan spiritual, yang dalam ekonomi Islam turut menentukan kesejahteraan (Chapra et al., 2008). Secara parsial, hanya inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, H_3 diterima, sedangkan H_1, H_2, dan H_4 ditolak.

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.73660

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan: Pertumbuhan yang Belum Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien 0,141 dengan signifikansi 0,532 (> 0,05). Artinya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini tidak mendukung teori *trickle-down effect* maupun temuan Dollar & Kraay (2002). Temuan ini juga berbeda dengan Falah & Rahmawati (2024) menemukan bahwa pertumbuhan atau output daerah menurunkan kemiskinan secara signifikan. Namun, temuan ini sejalan dengan pandangan Martínez-Navarro et al. (2020) serta Mahardika & Kusuma (2022) bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat melemahkan manfaat pertumbuhan bagi kelompok miskin. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Bulukumba belum bersifat *pro-poor* (Asrahmaulyana, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bulukumba belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distribusi. Pertumbuhan yang hanya dinikmati sektor atau kelompok tertentu bertentangan dengan pesan Q.S. Al-Hasyr: 7 agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Pembangunan dalam Islam harus memadukan pertumbuhan dengan pemerataan agar seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (Asrahmaulyana, 2021). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Bulukumba perlu diarahkan agar lebih inklusif, antara lain melalui penyaluran zakat produktif kepada kelompok miskin sehingga mereka ikut menikmati hasil pembangunan.

Pendapatan per Kapita dan Kemiskinan: Perspektif Hifzh al-Mal

Nilai PDRB per kapita ADHB memiliki koefisien -0,023 dengan signifikansi 0,745 (> 0,05). Artinya, pendapatan per kapita berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Arah koefisien sesuai dengan teori dan penelitian Azizah et al. (2021), tetapi pengaruhnya belum kuat secara statistik. PDRB per kapita adalah nilai rata-rata sehingga tidak menggambarkan bagaimana pendapatan didistribusikan antarpenduduk (Todaro & Smith, 2009) . Selain itu, PDRB per kapita ADHB masih memuat unsur kenaikan harga sehingga sebagian kenaikannya tidak mencerminkan peningkatan pendapatan riil masyarakat miskin.

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) tidak cukup diukur dari besarnya harta rata-rata, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan setiap individu hingga batas kecukupan (Asrahmaulyana, 2021). Islam menetapkan hak orang miskin di dalam harta orang mampu (Q.S. Adz-Dzariyat: 19). Karena itu, kenaikan pendapatan daerah perlu diikuti dengan optimalisasi zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi agar manfaatnya menjangkau kelompok miskin secara langsung (Widiastuti & Kosasih, 2021).

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.xxxxx

Inflasi dan Kemiskinan: Perspektif Stabilitas Harga dalam Islam

Inflasi memiliki koefisien 0,578 dengan signifikansi 0,018 (< 0,05). Artinya, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Setiap kenaikan inflasi sebesar satu poin persentase berkaitan dengan bertambahnya penduduk miskin sebesar 0,578 ribu jiwa, *ceteris paribus*. Inflasi merupakan satu-satunya variabel yang signifikan secara parsial. Temuan ini mendukung teori bahwa inflasi lebih membebani kelompok miskin (Easterly & Fischer, 2001) dan sejalan dengan penelitian Sembiring et al. (2021) , Susanto & Pangesti (2021) serta Riyadi et al. (2025). Kenaikan harga menurunkan daya beli, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk pangan dan kebutuhan pokok. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan menjadi rentan jatuh miskin ketika harga naik lebih cepat daripada pendapatannya.

Dalam ekonomi Islam, stabilitas harga merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*), karena kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengancam kelangsungan hidup keluarga miskin. Merujuk pada pemikiran Al-Maqrizi, inflasi tidak hanya bersumber dari kelangkaan alamiah, tetapi juga dari kesalahan manusia, seperti penimbunan dan pengelolaan yang buruk (Karim, 2017). Larangan *ihtikar* dalam hadis riwayat Muslim menegaskan bahwa praktik yang memicu kenaikan harga merupakan perbuatan dosa. Oleh karena itu, pengendalian inflasi di Bulukumba perlu ditempuh melalui pengawasan pasar dalam semangat *hisbah*, pencegahan penimbunan, dan penyaluran zakat serta infak yang lebih responsif ketika harga kebutuhan pokok naik. Hasil ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati karena inflasi yang digunakan adalah inflasi Sulawesi Selatan sebagai proksi.

Pengangguran dan Kemiskinan: Perspektif Kewajiban Bekerja dalam Islam

Tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien 0,505 dengan signifikansi 0,195 (> 0,05). Artinya, pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini sejalan dengan Mahmud et al. (2021) di Pulau Sulawesi. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan oleh banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan rendah (Todaro & Smith, 2009) . Mereka tidak tercatat sebagai penganggur, tetapi pendapatannya belum cukup untuk keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, masalahnya bukan hanya ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi juga kualitas dan kelayakan pendapatan dari pekerjaan tersebut. Temuan Asrahmaulyana et al. (2023) di Kota Makassar memperkuat penjelasan ini: jenis pekerjaan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, sehingga kualitas pekerjaan lebih menentukan kesejahteraan daripada sekadar status bekerja.

Islam sangat menghargai kerja sebagai jalan memperoleh rezeki (Q.S. Al-Jumu'ah: 10; Q.S. At-Taubah: 105). Namun, Islam juga menuntut agar pekerja memperoleh hasil yang layak

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.73660

untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, zakat tidak cukup disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi perlu diarahkan menjadi modal dan pendampingan usaha agar pekerja miskin di sektor informal meningkat produktivitasnya dan berubah dari mustahik menjadi muzakki. Program zakat produktif tersebut perlu dirancang dengan *maqashid syariah* sebagai parameter keberhasilannya (Mubarrak et al., 2023).

Implikasi bagi Manajemen Pengentasan Kemiskinan Berbasis Ekonomi Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bulukumba paling sensitif terhadap kenaikan harga, sedangkan pertumbuhan, pendapatan rata-rata, dan pengurangan pengangguran belum cukup kuat menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena itu, pengentasan kemiskinan perlu dikelola melalui sinergi program pemerintah daerah dengan pengelolaan ZISWAF dalam empat fungsi manajemen yang dilandasi nilai-nilai Islam (Asrahmaulyana, 2021).

Pertama, perencanaan berbasis keadilan (*'adl*). Pemerintah daerah dan BAZNAS Kabupaten Bulukumba perlu menggunakan basis data yang sama dalam menentukan sasaran, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial yang dipadukan dengan data mustahik dan ukuran *had al-kifayah*. Perencanaan juga perlu memetakan rumah tangga yang rentan terhadap kenaikan harga, karena kelompok inilah yang paling mudah jatuh miskin.

Kedua, pengorganisasian berbasis musyawarah (*syura*) dan tolong-menolong (*ta'awun*). Diperlukan forum koordinasi antara pemerintah daerah, tim pengendalian inflasi daerah, BAZNAS, Kementerian Agama, nazhir wakaf, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid dan desa. Pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan menyediakan layanan dasar, sedangkan lembaga ZISWAF menjangkau kelompok miskin yang belum tersentuh program pemerintah.

Ketiga, pelaksanaan berbasis pemberdayaan. Untuk meredam dampak inflasi, zakat dan infak dapat disalurkan sebagai bantuan pangan yang responsif saat harga naik, didukung operasi pasar dan pencegahan penimbunan. Untuk menjadikan pertumbuhan lebih inklusif, zakat produktif disalurkan sebagai modal usaha dan pendampingan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, wakaf produktif seperti lahan pertanian dan unit usaha dikembangkan agar membuka lapangan kerja dengan pendapatan yang layak (Asrahmaulyana, 2021), disertai pelatihan keterampilan dan pembinaan keagamaan bagi penerima manfaat. Sebagian dana zakat juga perlu dialokasikan untuk beasiswa anak dari keluarga miskin, karena pendapatan dan pendidikan orang tua menentukan pendidikan anak (Asrahmaulyana, 2021). Langkah ini sejalan dengan pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) dan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.xxxxx

Keempat, pengawasan berbasis amanah. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan, tetapi juga dari perbaikan kondisi spiritual mustahik dengan indeks CIBEST (Asrahmaulyana, 2021). Pengawasan pasar dalam semangat *hisbah* serta publikasi laporan penghimpunan dan penyaluran dana secara berkala diperlukan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat (Asrahmaulyana, 2021). Dengan model ini, pengentasan kemiskinan diarahkan untuk mencapai *falah* sesuai tujuan *maqashid syariah* (Asrahmaulyana, 2021).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah observasi hanya 15 tahun sehingga hasilnya perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Inflasi menggunakan data Sulawesi Selatan sebagai proksi, dan data pengangguran tahun 2016 diperoleh melalui interpolasi. Model juga belum memasukkan variabel ZISWAF dan dimensi spiritual kemiskinan secara langsung, sehingga model manajemen yang dirumuskan masih bersifat konseptual dan perlu diuji melalui penelitian lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, PDRB per kapita ADHB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, inflasi berpengaruh positif dan signifikan, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba periode 2010–2024. Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan dan mampu menjelaskan 78,1 persen variasi jumlah penduduk miskin. Dalam kerangka *maqashid syariah*, temuan ini menunjukkan bahwa pemeliharaan harta dan jiwa masyarakat miskin paling terancam oleh kenaikan harga, sedangkan pertumbuhan dan pendapatan rata-rata belum terdistribusi secara adil.

Secara praktis, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bulukumba perlu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan peningkatan kualitas pekerjaan. Upaya tersebut perlu dikelola melalui sinergi pemerintah daerah dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, mulai dari perencanaan yang adil, pengorganisasian berbasis musyawarah, pelaksanaan yang memberdayakan, hingga pengawasan yang amanah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data inflasi tingkat kabupaten, memperluas cakupan ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta memasukkan variabel dana ZISWAF dan indikator kemiskinan spiritual ke dalam model.

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.73660

DAFTAR PUSTAKA

Asrahmaulyana, A. (2021). Pengaruh jumlah tanggungan, pendapatan dan pendidikan kepala keluarga terhadap tingkat pendidikan anak di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *ICOR: Journal of Regional Economics*, *2*(3), 41–51. https://doi.org/10.24252/icor.v2i3.27022

Asrahmaulyana, A., Ma'ruf, M. I., Qarina, Q., & Aisyah, S. (2023). Breaking Barriers; Socioeconomic Determinants of Household Consumption under the Leadership of Woman. *EcceS (Economics Social and Development Studies)*, *10*(2). https://doi.org/10.24252/ecc.v10i2.42837

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *7*(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361

Chapra, M. U., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah (Occasional Papers Series 15). *Occasional Papers Series 15, No 235*.

Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, *7*(3). https://doi.org/10.1023/A:1020139631000

Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor. *Journal of Money, Credit and Banking*, *33*(2). https://doi.org/10.2307/2673879

Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The GRDP per capita, human development index, open unemployment rate, regional expenditure, and poverty in East Java Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *25*(1). https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21327

Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics 4th Edition. In *Tata McGraw-Hill*. https://doi.org/10.1126/science.1186874

Hastin, M., & Siswadhi, F. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan*, *10*(1).

Karim, A. A. (2017). Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jakarta: Rajawali Pers*.

Karunia, S. O. F., & Amir, F. (2024). Productive zakat distribution in improving mustahik welfare: CIBEST model approach. *Journal of Enterprise and Development*, *6*(2). https://doi.org/10.20414/jed.v6i2.9723

Mahardika, A. E., & Kusuma, H. (2022). Analisis Determinan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, *6*(2). https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20516

Martínez-Navarro, D., Amate-Fortes, I., & Guarnido-Rueda, A. (2020). Inequality and development: is the Kuznets curve in effect today? *Economia Politica*. https://doi.org/10.1007/s40888-020-00190-9

Mubarrak, H., Munir, B., & Achyar, G. (2023). Enhancing Productive Zakat Programs in Light of MaqÄ□á¹£id SyarÄ«'ah: Chance and Challenge in Contemporary Aceh. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, *6*(1). https://doi.org/10.21154/elbarka.v6i1.6140

Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. *Economics Letters*, *78*(1). https://doi.org/10.1016/S0165-1765(02)00205-7

Riyadi, A. A., Zuliansyah, A., & Zulaikah, Z. (2025). INFLUENCE INFLATION, LEVEL UNEMPLOYMENT OPEN AND HEALTH AGAINST EXTREME POVERTY IN INDONESIA FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE 2000-2024 USING A VECTOR ERRORS CORRECTION MODEL APPROACH. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *9*(2). https://doi.org/10.33650/profit.v9i2.13031

Sembiring, I. P. S., Simanjuntak, S., & Sitepu, V. A. (2021). Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2006–2020. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, *2*(2). https://doi.org/10.47747/jismab.v2i2.247

DOI : 10.24252/iqtisaduna.v10i2.xxxxx

Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, *7*(2). https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Pembangunan Ekonomi:* (Kesebelas). Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th editi). Pearson.

Widiastuti, A. S., & Kosasih. (2021). Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *4*(1). https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.973